

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Kondisi Geografis

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua pulau besar yaitu pulau Lombok dan pulau Sumbawa dan ratusan pulau kecil-kecil. Dari 280 pulau yang ada, terdapat 32 pulau yang telah berpenghuni. Luas wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 20.153,15 km². Terletak antara 115°46' - 119°5' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang selatan. Menurut data dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika (BMKG), temperature maksimum pada tahun 2010 berkisar antara 31,1°C-24,7°C. temperature tertinggi pada bulan Maret dan terendah pada bulan Juli.

Letak geografis Nusa Tenggara Barat berada pada 115° 46' Bujur Timur, 119° 5' Bujur Timur, 8° 10' Lintang Selatan dan 9° 5' Lintang Selatan.

Batas wilayah Nusa Tenggara Barat yaitu:

Sebelah Utara : Laut Jawa dan Flores

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Selat Lombok/ Provinsi Bali

Sebelah Timur : Selat Sape/ provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

Tabel 2.1.

Luas daerah Nusa Tenggara Barat menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/kota	Luas km ²	Presentase (%)
Lombok Barat	1.053,92	5,23
Lombok Tengah	1.208,40	6,00
Lombok Timur	1.605,55	7,97
Lombok Utara	809,53	4,02
Sumbawa	6.643,98	32,97
Dompu	2.324,60	11,53
Bima	4.389,40	21,78
Sumbawa Barat	1.849,02	9,17
Kota Mataram	61,30	0,30
Kota Bima	207,50	1,03
Jumlah / Total	20.153,20	100,00

Sumber : NTB dalam angka 2011

Dari tujuh gunung yang ada di pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 3.726 mdpl, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m dari sembilan gunung yang ada.

Luas pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (76,49%) atau 2/3 dari luas provinsi Nusa Tenggara Barat, dan luas pulau Lombok hanya mencapai 1/3 saja.

Di antara kabupaten/kota di Provinsi NTB terdapat di kota Mataram pulau Lombok

2. Penduduk, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Penduduk

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2010, jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat mencapai 4.500.212 jiwa. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 2.183.646 jiwa dan perempuan sebanyak 2.316.566 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 106,09. Jumlah penduduk terbesar terdapat di kabupaten Lombok Timur dan yang terkecil di Kabupaten Sumbawa Barat.

Bila dilihat menurut kelompok umur, komposisi penduduk provinsi NTB berbentuk pyramid dengan komposisi penduduk terbanyak berada pada umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 475.429 jiwa, dan terkecil pada kelompok umur 60-64 tahun.

b. Tenaga Kerja

Jumlah penduduk NTB berumur 15 tahun ke atas mencapai 3.380.129 orang. Penduduk yang bekerja mencapai 2.132.933 orang (63,10 %), sekolah 244.475 orang. Jumlah penduduk yang mencari pekerjaan berdasarkan Susunan mencapai 119.143 orang. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, pada tahun 2010 jumlah yang mencari kerja yang terdaftar di provinsi NTB sebanyak 45.981 orang, terdiri dari 26.173 laki-laki dan 19.908 perempuan. Dari jumlah tersebut yang sudah mendapatkan pekerjaan sebanyak 31.206

orang yang di dominasi oleh tenaga kerja hanya tamat Sekolah dasar mencapai 75.46% atau 23.549 orang.

Jumlah TKI yang terdaftar pada tahun 2010 mencapai 56.150 orang dengan komposisi 66,62% laki laki. Di lihat menurut Negara tujuan, TKI resmi asal NTB paling banyak bekerja di Malaysia Barat dan Saudi Arabia.

Jumlah PNS Pemerintah Provinsi NTB pada triwulan 1 2010 sebanyak 7.595 orang, yang terdiri dari 390 orang golongan I, 2.732 orang golongan II, 3.897 orang golongan III dan sebanyak 576 orang golongan IV.

c. Transmigrasi

Jumlah transmigrasi dari NTB pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2009. Bila pada tahun 2009, transmigrasi asal NTB berjumlah 986 jiwa dengan 260 kepala keluarga. Sementara itu pada tahun 2010 berjumlah 1.972 jiwa dengan 472 kepala keluarga.

3. Keanggotaan DPRD provinsi Nusa Tenggara Barat

Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah. Pemerintah Nusa Tenggara Barat di pimpin oleh Gubernur sebagai kepala eksekutif dan wakil gubernur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah badan Legislatif daerah.

Tabel 2.2

Presentase Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu
 Anggota DPRD tahun 2004 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	NAMA PARTOL	PEROLEHAN SUARA	% SUARA	PEROLEHAN KURSI	% KURSI
1	Partai Nasional Indonesia Maehaenisme	17.324	0.91	0	0.0
2	Partai Sosial Buruh Demokrat	9.083	0.48	0	0.0
3	Partai Bulan Bintang	194.103	10.24	6	10.91
4	Partai Merdeka	34.826	1.84	0	0.0
5	Partai Persatuan Pembangunan	170.630	9.01	6	10.91
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	42.985	2.27	0	0.0
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	20.846	1.10	0	0.0
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	24.850	1.31	0	0.0
9	Partai Demokrat	80.801	4.26	3	5.45
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	32.324	1.71	0	0.0

11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	25.155	1.33	0	0.0
12	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	25.786	1.36	0	0.0
13	Partai Amanat Nasional	111.762	5.90	4	7.27
14	Partai Karya Peduli Bangsa	41.394	2.18	0	0.0
15	Partai Kebangkitan Bangsa	87.154	4.60	3	5.45
16	Partai Keadilan Sejahtera	114.829	6.06	6	10.91
17	Partai Bintang Reformasi	142.358	7.51	5	9.09
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	132.350	6.99	6	10.91
19	Partai Damai Sejahtera	4.931	0.26	0	0.0
20	Partai Golongan Karya	471.137	24.87	15	27.27
21	Partai Patriot Pancasila	25.245	1.33	1	1.82
22	Partai Serikat Indonesia	35.209	1.86	0	0.0
23	Partai Persatuan Daerah	28.593	1.51	0	0.0

24	Partai Pelopor	21.024	1.11	0	0.0
	JUMLAH	1.894.699	100.0	55	100.0

Sumber: KPU NTB

Berdasarkan hasil dari pemilu 2004 maka jumlah DPRD di provinsi NTB sebanyak 55 orang dari berbagai partai politik, jumlah kursi paling banyak di dapatkan oleh Partai Golongan Karya dengan jumlah kursi 15 orang, dan di ikuti oleh partai-partai lain. Untuk dapat ikut dalam pemilu pada NTB tahun 2008 maka partai-partai yang tidak memenuhi kuota harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi syarat yaitu dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik tersebut dan menghitung persentasenya; dan menjumlahkan perolehan suara sah gabungan antar partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan persentasenya. Sedangkan untuk partai golongan karya tidak perlu melakukan koalisi karena persentase suara untuk ikut pada pemilu pada NTB sudah memenuhi. Pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon adalah sekurang-kurangnya 9 kursi dari 55 kursi DPRD Provinsi.

B. Kabupaten Lombok Timur

1. Sejarah dan Kondisi Geografis

Nama Pulau Lombok juga sering di sebut sebagai Gumi Sasak atau Gumi Selaparang. Selaparang adalah nama kerajaan lokal tertua di Lombok. Dalam bidang demografi, penduduk asli pulau Lombok adalah suku Sasak. Sejarah pulau Lombok menunjukkan ada lima etnis selain etnis sasak yang menempati pulau

yaitu Bali, Makassar, Cina, Arab dan Sumbawa. Jumlah penduduk pulau Lombok

secara keseluruhan yaitu 2.765.849, jumlah penduduk terbanyak terdapat di kabupaten Lombok Timur yaitu sebanyak 1.105.582 jiwa.

Pulau Lombok terletak antara 8°12 dan 9°1 Lintang Selatan dan antara 115°44 116°40 bujur Timur. Luas pulau Lombok dengan pulau-pulau yang ada di sekitarnya 103,5 mil persegi atau 4700 km. pulau Lombok sekarang terbagi menjadi empat kabupaten yaitu, kabupaten Lombok Barat dengan luas, Lombok Tengah, Lombok Utara dan Lombok Timur. Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten yang baru dibentuk berdasarkan pemekaran wilayah.

Di sebelah Barat Pulau Lombok terdapat pulau Bali, yang dipisahkan oleh selat Lombok, di sebelah Timur adalah pulau Sumbawa yang dipisahkan oleh Selat Alas. Di sebelah Barat pulau Lombok berbatasan dengan Lautan Jawa, sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia

Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 km², meliputi daratan seluas 1.605,55 km² atau (59,91%) dan lautan (dihitung 4 mil dari garis pantai) seluas 1.704,33 km² atau (40,09%). Dari daratan yang seluas 1.605,55 km² tersebut atau 160.555 hektar menjadi lahan sawah sebanyak 44.861 hektar (27,94%) dan lahan kering 115.694 hektar (70,06%).²¹

²¹ Nusa Tenggara Barat dalam angka 2011

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 1.105.671 jiwa, yang terdiri dari pria 514.327 jiwa dan wanita 591.344 jiwa. Sehingga seks ratio-nya sebesar 87 per 100, artinya tiap 100 wanita terdapat 87 pria. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki.

Dilihat dari kepadatan penduduk, kecamatan dikelompokkan kedalam tiga kategori kepadatan, yaitu:

1. Tinggi (> 2.000 jiwa per km²) meliputi Sakra, Masbagik, Sukamulia dan Selong
2. Sedang (1000 – 2000 jiwa per km²) meliputi Keruak, Sakra Barat, Sakra Timur, Terara, Montong Gading, Suralaga, Labuhan Haji dan Wanasaba
3. Rendah (< 1000 jiwa per Km²) meliputi Jerowaru, Sikur, Pringgasela, Pringgabaya, Suela, Aikmel, Sembalun dan Sambelia.

Sedangkan untuk tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lombok Timur rata-rata berkembang sebesar 16.8% pertahun. Dengan kepadatan rata-ratanya mencapai 689 orang per kilo meter persegi untuk tahun 2010.

Tabel 2.3

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lombok Timur Tahun 2003-2010

No	Tahun	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan (%)
		Laki laki	Perempuan	
1	2003	469.891	542.962	
2	2004	472.662	550.179	0,98
3	2005	474.714	558.955	1,06
4	2006	480.791	572.556	1,90
5	2007	486.645	581.028	1,36
6	2008	493.007	588.623	0
7	2009	496.312	599.853	0
8	2010	514.327	591.344	0

Sumber: website Kabupaten Lombok Timur

3. Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur pada umumnya berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Lebih-lebih dengan lahirnya undang undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah menjadikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih dinamis.

Sebagai panduan dan pengarah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan serta program pembangunan yang di tetapkan maka target diarahkan

untuk mencapai kondisi yang digambarkan oleh visi dan misi pemabangunan daerahnya, yaitu :

VISI

“Mewujudkan masyarakat Lombok Timur yang adil dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam keadilan dalam lindungan Allah SWT”

MISI

1. Pemerataan pembangunan diseluruh wilayah dan semua sektor prioitas yaitu sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
2. Mewujudkan pembangunan nyata ekonomi kerakyatan berbasis agro industri dan bahari yang berwawasan lingkungan
3. Mendorong reformasi birokrasi dengan sungguh sungguh untuk mencairkan kebekuan birokrasi menuju aparatur yang bersih, berorientasi pada pelayanan publik dan penggunaan anggaran yang pro publik.
4. Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial politik, mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan terhadap anak.

a. Mata Pencaharian

Potensi sumber daya manusia di Kabupaten Lombok Timur didasarkan atas ketersediaan tenaga kerja serta keahlian yang dimiliki oleh

rata-rata tenaga kerja yang belum tersalurkan dari masing-masing

kecamatan yang ada sekitar 5-10% dengan rata-rata pendidikan terakhir SD-SMP dan banyak yang putus atau tidak sekolah.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, prosentase penduduk untuk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha seperti bidang pertanian (48,80%), pada bidang industri pengolahan (13,46%), untuk usaha perdagangan sebesar 17,15%, untuk bidang jasa-jasa (8,71%), bidang konstruksi (2,80%), angkatan dan komunikasi (6,05%) dan lain-lainnya sebesar 3,03%.

b. Bidang Agama

Jumlah penduduk agama Islam selama tahun 2009 adalah sebanyak 1.095.489 jiwa atau sekitar 99,94%, sedangkan pemeluk Kristen sebanyak 137 orang, dan Hindu 539 orang. Dilihat dari ketersediaan fasilitas peribadatan, Kabupaten Lombok Timur juga terkenal dengan sebutan seribu masjid, dimana pada tahun 2009 tercatat masjid sebanyak 1.184 atau dengan kata lain selama kurun waktu dua tahun telah dibangun masjid sebanyak 72 unit. Sedangkan Gereja dan Pura masing-masing 1 unit dan berada di kecamatan Selong.

c. Bidang Pendidikan

Pemerintah melalui Program Wajib Belajar mengharuskan penduduk usia sekolah 6-17 tahun dapat mengikuti pendidikan formal SD, SLTP. Bahkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Wajib

Belajar tersebut, pemerintah mengalokasikan dana subsidi pendidikan yang semakin besar dari tahun ke tahun dari nilai total APBN.

Pencapaian tingkat kemajuan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari 3 katagori yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) khusus untuk jenjang pendidikan dasar yang dikaitkan dengan program Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Perluas Akses Pendidikan Tahun 2007 – 2010

No	Indikator Kinerja	2007	2008	2009	2010
1	APK TK/RA	15,21	15,36	31,81	110.45
2	APK SD/MI/ Paket A	104.69	107.95	109.20	98.42
3	APM SD/MI/ Paket A	90.05	93.82	96.12	105.55
4	APS (7-12 tahun)	95.09	98.67	102.11	84.25
5	APK SMP/MTs/Paket B	68.09	79.71	81.98	64.54
6	APM SMP/MTs/Paket B	52.93	61.92	63.23	86.69
7	APS (13 – 15 tahun)	68.66	79.65	83.17	55.74
8	APK SMA/SMK/MA/Paket C	45.35	53.70	54.72	42.93
9	APM SMA/SMK/MA/Paket C	33.63	39.63	41.28	110.45

Sumber: website Kabupaten Lombok Timur

d. Bidang Kesehatan

Fasilitas kesehatan di kabupaten Lombok Timur terdiri atas Rumah Sakit, Poliklinik, Puskesmas Pembantu, Polindes, tempat Praktek Dokter dan Posyandu: Jumlah RSUD di Lombok Timur sebanyak satu unit yang terletak di Ibukota Kabupaten Selong. Kemudian pada tahun 2009 di lengkapi dengan Puskesmas yang setara dengan Rumah Sakit yaitu Keruak dan Aikmel. Maka untuk fasilitas berupa rumah sakit di kabupaten Lombok Timur sebanyak 8 unit, puskesmas sebanyak 9 unit, puskesmas pembantu 87 unit, polindes 111 unit yang ada di setiap kecamatan, posiyandu sebanyak 961 unun yang tersebar disetiap desa, sedangkan rumah sakit bersalin sebanyak 6 unit, 4 ada di Selong dan Sikur dan Terara masing-masing satu.

e. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Lombok Timur masih tergolong rendah. IPM Kabupaten Lombok Timur berada urutan kedua dari bawah (peringkat 7) dari 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi NTB. Rendahnya pencapaian angka IPM ini juga ditunjukkan dengan rendahnya capaian beberapa indikator IPM yang meliputi Angka Melek Huruf (AMH), Angka Lama Sekolah (ALS) Penduduk Usia 15 tahun keatas , Angka Harapan Hidup (AHH), dan Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP).

Pada saat yang sama Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7 – 12 tahun (SD) mencapai 97,73%, APS penduduk usia 13 – 15 tahun (SLTP) 84,63%, APS penduduk usia 16- 18 tahun (SLTA) 50,61%. Keadaan ini tentu saja masih memprihatinkan karena hal ini berarti pada tingkat usia SD, SLTP dan SLTA masih banyak penduduk usia sekolah yang tidak/belum bersekolah maupun yang tidak bersekolah lagi. Pada tingkat usia SD tercatat 1,47 % yang tidak/belum bersekolah dan 1,46 % yang tidak bersekolah lagi; pada tingkat usia SLTP tercatat yang tidak/belum pernah sekolah 0,54 % dan yang tidak sekolah lagi 14,83 %; pada tingkat usia SLTA tercatat yang tidak/belum pernah sekolah 1,82 % dan yang tidak sekolah lagi 47,57 %.²²

C. Deskripsi Organisasi Nahdatul Wathan

1. Sejarah Berdirinya Nahdatul Wathan

Berdirinya organisasi Nahdatul Wathan (NW) tidak terlepas dari tuntutan kebutuhan masyarakat terutama dalam pendidikan waktu itu. Pendidikan di pulau Lombok pada saat itu masih sangat terbelakang karena adanya tekanan dari pemerintah colonial Belanda dan lamanya kerajaan Hindu Bali yang bercokol di pulau Lombok. Maka sebagai organisasi baru Nahdatul Wathan harus berhadapan dengan kepercayaan lokal yang sudah cukup mapan, dan juga berhadapan dengan pemerintahan

colonial Belanda yang melarang berdirinya lembaga pendidikan atau organisasi sosial keagamaan.

Sebelum berdirinya organisasi Nahdatul Wathan (NW) telah didirikan tiga lembaga pendidikan yang menjadi cikal bakal berdirinya organisasi ini yaitu, pesantren al-mujahidin, madrasah Nahdatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) yaitu madrasah yang khusus bagi laki laki, dan madrasah Nahdtul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) yang khusus bagi wanita.

Sesudah melihat perkembangan dan pertumbuhan pesat NWDI dan NBDI dan berdirinya beberapa cabang madrasah tersebut di luar daerah dan kota seperti madrasah as sa'ada Klayu Lombok Timur (1942), madrasah Nurul Iman Mamben Lombok Timur (1942), madrasah Hidayatul islam Masbagik (1944), Lombok Timur, madrasah Nurul Yaqin Praya Lombok Tengah (1942), dan madrasah madrasah lainnya, Maka TGH Zainuddin Abdul Majid melihat adanya kebutuhan yang lebih kompleks. Untuk mengontrol kedua lembaga pendidikan tersebut, beliau merasa butuh untuk mendirikan sebuah organisasi yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, Pembina, pemelihara dan penanggung jawab terhadap segala amal usaha yang dilakukan baik, dalam bidang pendidikan maupun sosial dan dakwah.

Pada tanggal 1 maret tahun 1953 TGH. Zinuddin Abdul Majid akhirnya berinisiatif mendirikan sebuah organisasi sosial kemasyarakatan

yang dinamakan Nahdatul Wathan (NW). Nama organisasi Nahdatul Wathan ini di ambil dari dua kata Arab yaitu Nahdlah dan Wathan, Nahdlah artinya kebangkitan, pergerakan sedangkan Wathan artinya tanah air dan Negara. Dengan demikian menurut pengertian bahasa Nahdatul Wathan berarti kebangkitan tanah air, pembangunan Negara atau membangun Negara. Sedangkan secara istilah Nahdatul Wathan adalah organisasi kemasyarakatan Islam Ahlussunah wal jama'ah 'ala Mazhabil Imamisy Syafi'i memusatkan kegiatannya pada bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyah.

Organisasi Nahdatul Wathan (NW) sejak berdirinya dipimpin oleh TGH Muhammad Zainuddin Abdul Majid sampai akhir hayat. Dari muktamar satu sampai IV beliau di tetapkan sebagai ketua umum PBNW, kemudian dalam muktamar V, VI dan VII beliau ditetapkan sebagai Ro'is 'Am Dewan Mustasyar PBNW, selanjutnya dlam muktamar kilat Istimewa tahun 1977 beliau ditetepkan sebagai Ro'is 'Am Dewan PBNW dan sekaligus merangkap sebagai ketua Mustasyar Umum PBNW, dan pada Muktamar VII dan IX beliau di tetapkan sebagai Ro'is "Am Dewan Mustasyar PBNW.

2. Legalitas Organisasi

Sebagai sebuah organisasi formal, eksistensi Nahdlatul Wathan mendapat legalitas yuridis formal berdasarkan Akte Nomor 48 tahun 1957 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris pembantu Hendrix Alexander

Malada di Mataram. Akte ini bersifat sementara, karena wilayah yurisdiksinya hanya di Pulau Lombok, sehingga tidak memungkinkan untuk mengembangkan organisasi ke luar wilayah yurisdiksinya tersebut. Untuk itu, dibuat Akte Nomor 50, tanggal 25 Juli 1960, dihadapan Notaris Sie Ik Tiong di Jakarta. Kemudian pengakuan dan penetapan juga diberikan oleh Menteri Kahakiman Republik Indonesia no. J.A. 5/105/5 tanggal 17 Oktober 1960, dan dibuat dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 90, tanggal 8 November 1960. Dengan legalitas akte kedua ini, maka organisasi Nahdlatul Wathan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengembangkan organisasinya ke seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Marauke, sehingga setelah tahun 1960, maka terbentuklah pengurus Nahdlatul Wathan di Bali, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lainnya, bahkan sampai ke daerah Riau dengan status perwakilan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang keormasan yang antara lain berisi tentang penerapan Asas tunggal bagi semua organisasi kemasyarakatan, maka Nahdlatul Wathan dalam Mukhtamar ke-8 di Pancor, Lombok Timur pada tanggal 15-16 Jumadil Akhir 1406 H atau tanggal 24-25 Februari 1985 M mengadakan peninjauan dan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini kemudian di kukuhkan dengan Akte Nomor 32, juga tanggal 15 Februari 1987 M, yang dibuat dan disahkan oleh wakil Notaris sementara Abdurrahim, SH. di Mataram. Dengan demikian, maka jelaslah eksistensi

dan legalitas formal organisasi Nahdlatul Wathan sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan, kegiatan sosial, dan dakwah Islamiyah.

3. Visi dan Misi Nahdlatul Wathan

Visi organisasi Nahdlatul Wathan adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa dan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin dalam rangka memperoleh Ridha Allah di dunia dan di akhirat berdasarkan pada pokoknya NW, pokok NW iman dan taqwa. Sedangkan misi organisasi adalah penyelenggaraan pendidikan, kegiatan sosial, dan dakwah Islamiyah.

4. Lambang Organisasi Nahdlatul Wathan

Lambang organisasi Nahdlatul Wathan adalah "Bulan Bintang Bersinar Lima", dengan warna gambar putih dan warna dasar hijau.

Lambang ini memiliki makna, sebagai berikut:

- a. Bulan melambangkan Islam
- b. Bintang melambangkan Iman dan Taqwa
- c. Sinar Lima melambangkan Rukun Islam
- d. Warna Gambar Putih melambangkan Ikhlas dan Istiqomah
- e. Warna Dasar Hijau melambangkan Selamat Bahagia Dunia dan

5. Aqidah, Asas dan Tujuan Nahdlatul Wathan

Organisasi Nahdlatul Wathan menganut faham Aqidah Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah 'Ala Mazhabi Al-Imam Asyasyafi'i r.a. dan berasaskan Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985. Sejak awal berdirinya, organisasi berasaskan Islam dan kekeluargaan. Asasnya berlaku hingga muktamar ke-3, dan kemudian diganti dengan Islam Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah 'Ala Madzhib Al-Imam Al-Syafi'i. Perubahan ini terjadi mengingat khittah perjuangan kedua Madrasah induk, NWDI dan NBDI. Adapun sebagai landasan argumentasi Nahdlatul Wathan menganut aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah dan bermazhab Imam Syafi'i r.a. adalah sebagai berikut:

- a. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam al-Bukhari dalam Tarikh al-Kabir, al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Imam, Abu Dawud, Ibn Huzaimah, Ibn Hibban dan lain-lain. "Hendaklah kamu bersama golongan terbesar (mayoritas) dan pertolongan Allah selalu bersama golongan mayoritas, maka barangsiapa yang memisahkan diri (dari komunitas jama'ah) maka mereka termasuk dalam golongan orang-orang ahli neraka". (HR. tirmidzi) "Allah tidak menghimpun ummat ini dalam kesesatan selamanya dan pertolongan Allah selalu bersama golongan mayoritas". (HR. al-thabrani)

- b. Ummat Islam Indonesia sejak awal telah menganut aqidah Ahlul Sunnah wal Jama'ah dan menganut madzhab Syafi'i sejak mazhab masuk ke Indonesia.
- c. Madzhab Syafi'i dilihat dari segi sumber atau dasarnya, lebih unggul dibandingkan dengan madzhab-madzhab yang lain.
- d. Jumhur Ulama' Ushul menandakan bahwa orang yang belum sampai tingkatan ilmunya pada tingkatan mujtahid muthlaq maka wajib bertaqlid kepada salah satu madzhab empat dalam masalah furu' syri'ah.
- e. Asas dan tujuan organisasi Nahdlatul Wathan (NW) di sebut dan termuat sebelum Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 pasal 3 III diberlakukan. Anggaran Dasarnya yang berbunyi sebagai berikut: Asas : Organisasi ini berasaskan Islam Ahlul Sunnah Wal Jama'ah Ala Mazhabil Imam Asy Syafi'i r.a. Tujuan : Li 'lai kalimatillah wal izzul islam wal muslimin dalam rangka mencapai keselamatan serta kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Islam Ahlul Sunnah Wal Jama'ah 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i r.a. Dalam upaya mencapai tujuan organisasi diatas, di tetapkan ruang lingkup usaha organisasi Nahdlatul Wathan seperti termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui Pondok Pesantren, Diniyah, Madrasah/Sekolah di tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi, kursus-kursus, serta meningkatkan dan menyempurnakan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
2. Menyelenggarakan kegiatan sosial seperti menyelenggarakan Panti Asuhan, Asuhan Keluarga, Rubath/Pondok/Asrama Pelajar/Mahasiswa, Pos Kesehatan Pondok Pesantren (POSKESTREN), balai pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), klinik keluarga sejahtera dan rumah sakit.
3. Menyelenggarakan dakwah Islamiyah melalui pengajian (majelis dakwah/majelis ta'lim) tabligh, penerbitan, mengembangkan pusat informasi Pondok Pesantren dan media lainnya.
4. Memelihara ukhuwah Islamiyah dan perdamaian dalam masyarakat
5. Menghidupsuburkan masyarakat tolong menolong, mempertinggi amal sosial dan amal jariah.
6. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak merugikan Nahdlatul Wathan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

Dari usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi Nahdlatul Wathan diatas, terlihat bahwa organisasi bergerak di bidang pendidikan, sosial dan dakwah.²³

6. Struktur Organisasi Nahdlatul Wathan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bab VI pasal 6, struktur organisasi Nahdlatul Wathan adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Pusat, berkedudukan di tempat Pengurus Besarnya
- b. Tingkat Wilayah, berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Dati I
- c. Tingkat Daerah, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Dati II/Kodya
- d. Tingkat Cabang, berkedudukan di Kota Kecamatan
- e. Tingkat Anak Cabang, berkedudukan di Desa/Kelurahan
- f. Tingkat Ranting, berkedudukan di Dusun/Lingkungan
- g. Tingkat Perwakilan, berada di tempat-tempat yang dipandang perlu

7. Struktur Pengurus Nahdlatul Wathan

Struktur kepengurusan dalam organisasi Nahdlatul Wathan seperti tertuang dalam Bab VI pasal 7 Anggaran Dasar terdiri dua bagian yaitu:

a. Dewan Pembina, Pembimbing, dan Penasehat kegiatan organisasi Nahdlatul Wathan yang terdiri dari:

1. Dewan Mustasyar, selaku Pembina di tingkat Pengurus Besar.
2. Dewan Penasehat, selaku Pembimbing di tingkat pengurus Wilayah dan Daerah
3. Penasehat, selaku Penasehat di tingkat Pengurus Cabang, Anak Cabang dan Ranting

b. Pelaksana sehari-hari kegiatan Nahdlatul Wathan terdiri dari:

1. Pengurus Besar
2. Pengurus Wilayah
3. Pengurus Daerah
4. Pengurus Cabang
5. Pengurus Anak Cabang.
6. Pengurus Ranting
7. Pengurus Perwakilan

8. Badan-Badan Otonom Nahdlatul Wathan

Organisasi Nahdlatul Wathan mempunyai badan otonom yang se-ases

- a. Muslimat Nahdlatul Wathan
- b. Pemuda Nahdlatul Wathan
- c. Ikatan Pelajar Nahdlatul Wathan
- d. Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan
- e. Persatuan Guru Nahdlatul Wathan
- f. Jam'iyatul Qurra Wal Huffaz Nahdlatul Wathan
- g. Ikatan Sarjana Nahdlatul Wathan
- h. Badan Pengkajian, Penerangan, dan Pengembangan Masyarakat Nahdlatul Wathan.²⁴

D. DESKRIPSI TGH. MUHAMMAD ZAINUL MAJDI (TUAN GURU BAJANG)

1. Profil Tuan Guru Bajang

Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (lahir di Pancor, Selong, 31 Mei 1972; umur 36 tahun) adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat masa jabatan 2008-2013. TGB menjabat didampingi oleh Wakil Gubernur Badrul Munir.

²⁴ Lihat <http://rizalsuhardieksakta.blogspot.com/.../organisasi-nahdlatul-wathan-nw.html> . Di akses pada tanggal 12 Desember 2012

Sebelumnya, TGB menjadi anggota DPR RI masa jabatan 2004-2009 dari Partai Bulan Bintang yang membidangi masalah pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan (Komisi X).²⁵

2. Visi dan misi Tuan Guru Bajang pada pemilukada langsung Nusa Tenggara Barat 2008

Visi

Membangun Nusa Tenggara Barat lima tahun ke depan harus fokus pada tiga aspek yang selama ini menyebabkan NTB terpuruk dalam deretan IPM Nasional. Ketiga faktor tersebut adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, visi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2008-2013, adalah terjadinya suatu perubahan di Nusa Tenggara Barat ke arah yang lebih baik di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, visi Tuan Guru Bajang-Badrul Munir adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA
BARAT YANG LEBIH CERDAS, SEHAT, DAN BERDAYA”**

Cerdas yang dimaksud adalah suatu kondisi masyarakat yang lebih terdidik, lebih berpendidikan, baik dalam ranah intelektual,

²⁵ Lihat <http://jasmansyah76.wordpress.com/2008/07/26/profile-tuan-guru-bajang> di akses pada tanggal 6 Februari 2013

emosional dan spiritual. Untuk itu maka sektor pendidikan menjadi isu utama yang harus mendapatkan prioritas, baik dalam program maupun dalam alokasi anggaran.

Sehat diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Oleh karena maka sektor kesehatan menjadi prioritas berikutnya setelah pendidikan yang harus mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga tidak terdengar lagi persoalan-persoalan yang selama ini sangat memprihatinkan seperti gizi buruk, tingginya angka kematian bayi, rendahnya kesehatan ibu, dan sebagainya.

Berdaya diartikan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan ekonomi memadai, bahkan dapat berkembang ke tingkat kemampuan daya saing ekonomi yang tinggi. Dalam kaitan ini, persoalan serius yang selama ini menjadi keprihatinan kita seperti tingginya angka kemiskinan dan rendahnya daya saing daerah, haruslah mendapat porsi anggaran yang memadai. Berbagai akar persoalan kemiskinan seperti rendahnya produktivitas dan pendapatan tenaga kerja, terbatasnya kesempatan berusaha, pengangguran, minimnya investasi yang masuk ke daerah, dan sebagainya, merupakan persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Berbagai intervensi pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan selama ini harus dikembang-luaskan secara lebih merata,

sehingga tidak menjadi parsial dan terbatas dalam daerah atau kawasan

pilot project tertentu saja. **Berdaya** dalam hal ini juga berarti berdaya dalam soal politik dan sosial, dimana partisipasi masyarakat dalam ranah politik dan sosial kemasyarakatan menjadi indikatornya.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 9 program prioritas sebagai misi kami lima tahun ke depan, yaitu:

1. Memperjuangkan Pendidikan dan Kesehatan Gratis.
2. Membangun Lembaga Penjaminan Kredit Daerah dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan.
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur seperti Bandara Internasional Lombok, jalan raya, listrik dan pengairan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan investasi dalam rangka perluasan kesempatan kerja
5. Revitalisasi pembangunan pertanian, peternakan, dan kelautan
6. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan
7. Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi termasuk pemberdayaan TKW/TKI.

8. Menegakkan supremasi hukum dan birokrasi yang bebas KKN
9. Memelihara keharmonisan dan menghormati pluralitas agama dan budaya dalam masyarakat.

Program

Sesuai dengan visi dan misi di atas, maka program yang akan dilaksanakan oleh Tuan Guru Bajang KHM Zainul Majdi, MA dengan wakilnya Ir. H. Badrul Munir, MM adalah sebagai berikut:

1. Memperjuangkan Pendidikan dan Kesehatan Gratis.

Pendidikan dan kesehatan adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang memadai dari negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Oleh karena itu program pengentasan buta aksara dan wajib belajar 9 tahun harus segera dituntaskan dan pada waktunya segera mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Demikian pula dalam hal layanan kesehatan, adalah kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam kaitan dengan kedua aspek tersebut maka adalah tekad TGB-BM untuk memperjuangkan pendidikan dan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat, dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Program lain dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang akan menjadi perhatian/prioritas adalah

peningkatan kesejahteraan para pelaksana pendidikan dan kesehatan seperti guru, pegawai administrasi pendidikan, petugas medis dan non medis, serta perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan baik negeri maupun swasta.

2. Membangun Lembaga Penjaminan Kredit Daerah dalam rangka percepatan pengembangan ekonomi rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Salah satu persoalan mendasar dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat di NTB adalah sulitnya mendapatkan permodalan, apalagi bagi pengusaha mikro dan mereka yang baru memulai usahanya. Untuk itu salah satu terobosan yang akan dilaksanakan dalam kaitan ini adalah dengan mendirikan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah. Dengan adanya lembaga ini, yang akan didampingi dengan tenaga konsultan lapangan mitra bank, kami yakin akan tumbuh dan berkembang usaha-usaha baru di tengah-tengah masyarakat; termasuk dari keluarga miskin yang memiliki etos kerja dan semangat wirausaha tinggi. Sasarannya adalah tumbuhnya wirausahawan baru dan terserapnya tenaga-tenaga kerja baru dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan

3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur seperti Bandara Internasional Lombok, jalan raya, listrik dan pengairan

Sebagai daerah yang sedang berkembang kita masih membutuhkan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang sangat strategis dalam menunjang percepatan pembangunan di NTB adalah Bandara Internasional Lombok dengan berbagai sarana penunjangnya. Demikian juga infrastruktur yang lain, seperti listrik, jalan raya dan pengairan. Kesemuanya itu harus mendapatkan perhatian sehingga dapat terjadi percepatan pembangunannya di masa-masa mendatang. Pemerintah Daerah harus bekerja keras dan bersinergi baik dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada di NTB, Pemerintah Pusat, maupun dunia swasta dan bahkan dunia internasional.

4. Meningkatkan investasi dalam rangka perluasan kesempatan kerja

Salah satu persoalan yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi di NTB selama ini adalah rendahnya minat para investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Hal ini disebabkan antara lain karena masih banyaknya peraturan dan sikap aparat birokrasi kita yang kurang sesuai dengan keinginan para investor. Padahal di sisi yang lain, potensi sumberdaya alam kita masih sangat banyak yang belum dimanfaatkan untuk sebesar

besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah daerah ke depan harus punya komitmen tinggi untuk menghapus segala peraturan yang menghambat dunia investasi, menumbuhkan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi, dan memudahkan segala macam perijinan yang dibutuhkan.

5. Revitalisasi pembangunan pertanian, peternakan, dan kelautan

Sektor pertanian, peternakan, dan kelautan adalah sektor-sektor yang sangat strategis untuk dikembangkan lebih luas dan intensif dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan. Disamping itu, pembangunan sektor tersebut dengan strategi yang lebih tepat sangat diperlukan untuk menyangga ketahanan pangan daerah dan sekaligus dalam rangka mencegah terjadinya gizi buruk pada balita seperti yang yang akhir-akhir masih sering terjadi di daerah ini. Mengembalikan NTB sebagai gudang pangan dan gudang ternak nasional adalah obsesi kami, yang sekaligus nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Oleh karena itu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program ini menjadi suatu keharusan, disamping prinsip-prinsip partisipatif yang secara proaktif melibatkan para *stakeholder*. Demikian pula halnya dalam rangka meningkatkan program pemberdayaan sektor kelautan. Karakteristik provinsi NTB yang termasuk provinsi dengan luas

laut dan potensi sumberdaya laut yang tinggi, haruslah dapat

dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan

Pemanfaatan sumberdaya alam kita selama ini masih belum optimal. Masih banyak sumberdaya alam kita yang belum dimanfaatkan dengan baik, seperti lahan kering, tambak, kawasan dataran tinggi, pertambangan, kawasan wisata, dan lain-lain. Isu lingkungan yang telah menjadi isu global juga belum banyak kita manfaatkan dalam membangun daerah. Oleh karena itu diperlukan terobosan khusus untuk meraih sumber dana tersebut, sehingga kita dapat memanfaatkannya untuk pembangunan berbagai sumberdaya alam kita yang berpotensi ekonomi tinggi. Sungguhpun demikian, pemanfaatan sumberdaya alam tersebut haruslah dengan dengan bijaksana, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan demikian sumberdaya alam tersebut tidak hanya dapat dinikmati oleh generasi yang sekarang, namun dapat juga dinikmati oleh generasi

... atau anak-anak kita di masa-masa mendatang

7. Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi, termasuk pemberdayaan TKW/TKI.

Persoalan rendahnya keterwakilan perempuan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi di daerah ini harus diakui sebagai suatu persoalan dan hendaknya menjadi perhatian bersama. Jumlah aktivis perempuan dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, partai politik, anggota legislatif, dan pejabat di eksekutif masih relatif sedikit. Oleh karena itu harus ada kebijakan strategis yang nantinya diambil untuk mengatasi masalah ini secara structural. Di bidang pendidikan misalnya, harus ada beasiswa khusus yang dirancang untuk perempuan, sehingga angka putus sekolah pelajar perempuan dapat diturunkan seminimal mungkin. Demikian juga berbagai pelatihan ketrampilan dan usaha produktif bagi perempuan juga hendaknya mendapat perhatian yang memadai. Jika kita mencontoh Grameen Bank System di Bangladesh, dimana pengentasan kemiskinan dapat dikurangi secara drastis dengan program perkreditan khusus bagi pengusaha perempuan, maka kebijakan seperti itu tidak sulit untuk dilaksanakan di daerah ini yang potensi pengusaha kecil perempuannya relatif tinggi. Dengan demikian perempuan akan dapat lebih berdaya. Kepada perempuan produktif yang menjadi TKW/TKI ke luar negeri harus mendapatkan perlindungan dan

jaminan asuransi dari pemerintah daerah bekerja sama dengan PJTKI yang mengirimnya dan lembaga terkait lainnya.

8. Menegakkan supremasi hukum dan birokrasi yang bebas KKN

Tekad untuk menegakkan supremasi hukum adalah tekad kami yang didasari atas keyakinan bahwa hanya dengan menegakkan supremasi hukum rasa keadilan masyarakat akan terbangun. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang merasa dizalimi atau hak-haknya dikebiri. Pada saat yang sama tidak boleh pula ada kelompok masyarakat yang mendapatkan perlakuan istimewa dari penguasa. Prinsip kita sebagai negara hukum dimana semua orang harus mendapatkan perlakuan sama di depan hukum dan pemerintahan harus benar-benar menjadi kenyataan. Untuk itu, kita harus mulai dari diri sendiri, dari aparat pemerintah sebagai pelaksana sekaligus sebagai teladan. Integritas aparat pemerintah daerah harus dapat dijaga dari hal-hal yang tidak pantas, seperti tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan demikian diharapkan akan terwujud aparat pemerintah yang amanah dalam mengemban tugas dan fungsinya, serta adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.

9. Memelihara keharmonisan dan menghormati pluralitas agama dan budaya dalam masyarakat.

Program yang tidak kalah pentingnya di daerah ini adalah upaya kita yang sungguh-sungguh untuk melestarikan nilai-nilai agama dan budaya, dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan atau keharmonisan hidup bermasyarakat. Terjadinya konflik horizontal di daerah kita selama ini akibat dari kurangnya saling pemahaman antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Untuk itu berbagai lembaga yang *concern* menangani masalah konflik tersebut selama ini harus diberdayakan, potensi konflik yang ada juga harus dipetakan, sehingga kita dapat menghindari kemungkinan terjadinya konflik horizontal yang sifatnya terbuka, yang akan membawa dampak buruk terhadap potret daerah bagi orang luar.

Disamping itu, kita juga harus lebih serius menggali nilai-nilai yang ada dan tumbuh baik pada ajaran agama maupun nilai-nilai budaya, seperti kejujuran, keadilan, kepemimpinan, penghormatan terhadap sesama, semangat kerja keras, semangat gotong royong, jiwa kewirausahaan, dan lain-lain. Kesemua itu haruslah dapat dieksplorasi dengan baik sehingga dapat menjadi modal sosial yang kuat yang akan mempercepat proses kemajuan

masyarakat di daerah ini, sehingga dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah lain di Indonesia²⁶

3. Hasil pemilukada langsung provinsi NTB tahun 2008

Pemilihan kepala daerah (pemilukada) provinsi NTB telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2008, empat pasangan yang maju dalam pemilukada NTB yaitu pada nomer urut 1 pasangan Ir.H.Nanang Samodra KA.,M.Sc. dan Muhammad Jabir, SH., MH, pasangan nomer urut 2 yaitu Tuan Guru Bajang KH. M. Zainul Madjdi, MA. dan Ir. H. Badrul Munir, MM., nomer urut 3 pasangan Drs. H. Lalu Serinata dan H.M. Husni Djibril, B.Sc. dan pasangan terakhir yaitu dengan nomer urut 4 DR. H. Zaini Arony, M.Pd. dan Nurdin Ranggabarani, SH., MH.

Jumlah keseluruhan pemilih pada pemilukada langsung NTB tahun 2008 yang terdaftar sebanyak 3.012.816 orang dengan jumlah laki laki sebanyak 1.436.275 orang sedangkan perempuan 1.576.541 orang. Jumlah penduduk terdaftar yang menggunakan hak pilih tetap untuk TPS dalam wilayah KPU provinsi sebanyak 2.238.955 orang dengan jumlah pemilih laki-laki 1.038.014 orang sedangkan perempuan 1.200.941 orang. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 760.562 orang yaitu laki-laki sebanyak 389.217 orang dan perempuan 371.345 orang.

Tabel 2.5

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilu Kada Langsung Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	KABUPATEN/ KOTA	PASANGAN CALON				SUARA SAH
		Ir.H.Nanang Samodra KA.,M.Sc. dan Muhammad Jabir, SH., MH..	Tuan Guru Bajang KH. M. Zainul Madjdi, MA. dan Ir. H. Badrul Munir, MM.	Drs. H. Lalu Serinata dan H.M. Husni Djibril, B.Sc.	DR. H. Zaini Arony, M.Pd. dan Nurdin Ranggabarani, SH., MH.	
1.	Mataram	53.778	44.017	37.708	23.138	158.641
2.	Lombok Barat	64.255	116.131	64.476	146.153	391.015
3.	Lombok Tengah	68.893	145.178	150.660	66.666	431.397
4.	Lombok Timur	54.490	306.045	170.947	26.229	557.711
5.	Sumbawa Barat	10.737	20.367	15.067	4.720	50.891
6.	Sumbawa	24.133	87.544	60.653	41.409	213.739
7.	Dompu	34.660	21.822	15.419	33.034	104.935
8.	Kab. Bima	43.244	77.772	52.793	34.079	207.888
9.	Kota Bima	16.729	29.100	8.400	12.447	66.676
Perolehan Suara		370.919	847.976	576.123	387.875	2.182.893
Prosentase %		16,99	38,85	26,39	17,77	

Sumber : KPU Provinsi NTB Tahun 2008

Sesuai hasil rekapitulasi tersebut, KPU Provinsi NTB menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yaitu pasangan calon dengan Nomor Urut 2 yaitu : KH. M. Zainul Madjdi, MA. dan Ir. H. Badrul Munir, MM. yang memperoleh suara sebesar 847.976 atau 36,72% suara. Sesuai Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 270/441/KPU.NTB/VII/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat masa jabatan 2008-2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.²⁷